



Isu dan Permasalahan

Untuk kali kelima, Tiongkok menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi Shanghai Cooperation Organization (SCO). Acara yang diadakan di Tianjin pada 31 Agustus – 1 September 2025 disebut SCO plus dengan mengundang selain negara anggota juga negara pengamat. Tiongkok yang kembali menjadi presidensi juga menyajikan parade militer mendukung pemerintahan antifasis pascaperang dunia di mana Presiden Prabowo akhirnya menyempatkan diri untuk bergabung setelah sempat absen.

Organisasi Kerja Sama Shanghai pada awalnya adalah Shanghai Five karena saat itu anggotanya adalah China, Rusia, Kazakhstan, Kirgistan, dan Tajikistan. Forum SCO awalnya dibentuk untuk menyelesaikan masalah perbatasan setelah perang dunia berakhir dan runtuhan Uni Soviet. Pada Juni 2001, forum ini diperluas dengan menerima lebih banyak anggota yaitu Uzbekistan, India, Pakistan, Iran, dan Belarusia.

Dalam skala lebih luas, China dan Rusia sering menyebut SCO sebagai alternatif NATO yang juga mengalami perluasan keanggotaan. Kelompok SCO menguasai 20 persen cadangan minyak dunia dan 44 persen gas alam global serta 20 persen produk domestik bruto mencakup 40 persen populasi dunia. China mendapat momen besar dalam ajang KTT SCO yang mengambil nama Shanghai sebagai kota metropolitan China yang diikuti banyak negara besar dengan mengajukan dokumen terkait kepemimpinan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Presiden Xi Jinping ingin selain teringat pada nama Shanghai, publik Internasional perlu memperhatikan PBB sebagai organisasi dunia yang belum berfokus pada Global South.

Oleh karena itu, Presiden Xi Jinping menyampaikan Global Governance Initiative sebagai diskursus global yang keempat mengikuti the Global Development Initiative (GDI), Global Security Initiative, dan Global Civilization Initiative yang telah dirilis sebelumnya. Global Governance Initiatives menjadi nilai strategis yang dirumuskan ke dalam lima prinsip utama. Pertama, Xi Jinping mengajak negara-negara untuk melekatkan diri pada kesetaraan kedaulatan. Kedua, adalah pentingnya hukum internasional. Ketiga, adalah urgensi mempraktikkan multilateralisme. Keempat adalah *people-centered approach* dan terakhir kelima adalah aksi nyata. Sedangkan secara aplikatif, enam platform kerja sama dapat menjadi kepentingan strategis di antaranya energi, industri hijau, ekonomi digital, inovasi teknologi, pendidikan tinggi, vokasional, dan pendidikan teknis. Selain peluang sebagaimana yang telah disebutkan di atas, KTT SCO 2025 juga dihadapkan pada tantangan eksternal. Pertemuan trilateral disela perhelatan yang diselenggarakan oleh Xi Jinping, Kim Jong Un, dan Vladimir Putin dianggap Donald Trump adalah rencana untuk menghadang hegemoni AS. Namun demikian, Donald Trump juga menyatakan secara pribadi masih menjalin hubungan baik dengan ketiga pemimpin dunia tersebut.

Para pemimpin dari NATO dan Jepang tidak hadir dalam pertemuan tersebut sedangkan negara seperti Korea Selatan dan Singapura mengirim pejabat tingkat rendah. Masih terdapat anggapan bahwa KTT SCO merupakan poros yang tidak mendukung NATO, melainkan menyokong dukungan bagi Kremlin untuk menganeksasi Ukraina. Sedangkan Tiongkok adalah

2025

Minggu ke-1 September (1 s.d. 7 September 2025)

Isu Sepekan

Bidang Polhukam, Komisi I

mitra jangka panjang Moskow untuk senantiasa meningkatkan perekonomian. Dari Eropa tercatat hanya pendukung Rusia seperti, Viktor Lukashenko Presiden Belarus, Presiden Serbia Alexander Vucic, Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev, dan Perdana Menteri Nikol Pasinian. Pada kesempatan yang sama, Presiden Turki Racip Tayyeb Erdogan turut menyampaikan dukungannya atas perdamaian antara Azerbaijan dan Armenia.

Mayoritas pemimpin nasional pada acara tersebut berasal dari Asia. Raja Kamboja Norodom Sihamoni, Presiden Vietnam Luong Cuong, dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Pemimpin militer Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing dan Presiden Laos Thongloun Sisoulith juga bergabung dalam acara tersebut. Turut hadir dari Asia Selatan adalah Perdana Menteri Pakistan Shehzad Sharif, Perdana Menteri Nepal Khadga Prasad Oli, dan Presiden Maladewa Mohamed Muizzu. Dari Asia Tengah datang Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev, Presiden Tajikistan Emomali Rahmon, Presiden Kyrgyzstan Sadyr Japarov, Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev dan Presiden Turkmenistan Serdar Berdimuhamedow termasuk Presiden Mongolia Khurelsukh Ukhnaa. Hadir juga para pemimpin organisasi internasional antara lain Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB António Guterres, Sekjen SCO Ilmekbayev, Direktur Eksekutif Badan Regional Anti-Terorisme SCO Shalsheyev, Sekjen ASEAN Kao Kim Hour, Sekjen Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif Tasmagambetov, Sekjen Organisasi Kerja Sama Ekonomi Asia Tengah-Asia Barat Asadhan, Sekjen Conference on Interaction and Confidence-Building Measures in Asia (CICA) Sarybay, Ketua Komisi Eksekutif Ekonomi Eurasia Sagintayev.

Atensi DPR

Kehadiran Presiden Prabowo dalam acara parade militer RRC yang mengiringi perhelatan KTT SCO memiliki nilai strategis bagi pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Nilai strategis tersebut berupa pengakuan negara-negara peserta KTT SCO Tianjin 2025, termasuk China dan Rusia, terhadap peran Indonesia dalam percaturan politik global dan kawasan. Pada saat yang bersamaan, Indonesia harus dapat memanfaatkan nilai strategis forum SCO sebagai pencapaian kepentingan nasional Indonesia di forum internasional, terutama kepentingan penguatan kerja sama ekonomi selatan-selatan (Global South), yang mencakup enam platform kerja sama, di antaranya kerja sama energi, industri hijau, ekonomi digital, dan inovasi teknologi. Selain itu, penguatan kerja sama melalui pendekatan multilateralisme dan penegakan hukum internasional dalam menjaga stabilitas keamanan dan perdamaian internasional. DPR RI, khususnya melalui pelaksanaan fungsi pengawasan di Komisi I, perlu ikut mengawal dan memastikan bahwa keterlibatan Indonesia dalam forum SCO memberi kontribusi konstruktif bagi pencapaian kepentingan nasional, baik kepentingan ekonomi maupun politik dan keamanan.

Sumber

antaranews.com, 22 Agustus 2025;
cnn.com, 5 September 2025; dan
Republika, 5 September 2025.



EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

EKKUINBANG

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Mulianta Ginting
Eka Budiyanti
Edmira Rivani
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra R. Oktaviano
Uilly Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Firyal Nabihah
Ulayya Sarfina
Yosua Pardamean S.
Jeffrey Ivan Vincent
Fauzan Lazuardi R.
Anugrah Juwita Sari

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa

Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
EKKUINBANG Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making